

Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

Fredik Lambertus Kollo

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: fredikkollo@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi yang selalu mengutamakan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Tujuan dari kajian ini ialah agar dapat mengetahui pengaruh budaya patriarki terhadap partisipasi perempuan di bidang politik. Budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat, dari tradisi budaya patriarki selalu mengutamakan atau memposisikan kaum laki-laki paling atas jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Dari hal inilah perempuan merasa kurang diperhatikan sehingga perempuan kurang percaya diri untuk berkiprah atau maju dalam panggung politik. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Diharapkan agar selalau merangkul kaum perempuan dalam bidang politik karena perempuan juga harus memperoleh kesempatan untuk menduduki posisi strategis dalam dunia politik.

Kata kunci: *budaya patriarki, partisipasi politik perempuan.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam segala bidang kehidupan dan salah satunya ialah dalam hal pengambilan kebijakan. Sitepu (2016:6) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan output yang nyata dan utama dari sebuah sistem politik. Kebijakan politik tentu lebih mengutamakan kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pendapat Surbakti (2010:3) bahwa sebagian orang menyatakan kepentingan umum merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, antara lain: keadilan, kebaikan, kebahagiaan, dan kebenaran. Kepentingan umum harus diprioritaskan sebagaimana pendapat dari Azis (2012:33) bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan dari kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat dalam menjalankan program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat karena aspirasi-aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan juga harus memihak pada aspirasi masyarakat yang bersifat membangun.

Negara yang menganut sistem patriarki, dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan dan perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki, dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan (Nimrah & Sakaria, 2015:175).

Dari pandangan mengenai budaya patriarki di atas bahwa perempuan kurang percaya diri dalam dunia politik. Menurut Maiwa (2006:31) dalam Nimrah & Sakaria (2015:177) bahwa kehidupan perempuan yang seringkali digambarkan pada posisi yang lebih rendah, sehingga dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri dan bergantung, pandangan seperti inilah memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga berpihak pada budaya patriarki. Ada berbagai anggapan mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik, pada umumnya bisa dikatakan terlambat, sebab banyak stigma yang menyatakan bahwa perempuan diidentik dengan sektor domestik sehingga sangat sedikit perempuan yang turut andil dalam dunia politik (Nimrah & Sakaria, 2015:178).

Kepentingan dan pandangan kaum laki-laki, perempuan serta kelompok minoritas merupakan bagian mutlak dari proses pengambilan keputusan, tetapi keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat rendah (Nurwani, 2017:107). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah. Menurut Surbakti dalam Nurwani (2017: 29) menyatakan bahwa partisipasi perempuan yang masih sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat. Bicara tentang bagaimana perempuan 'merebut kursi' dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki Dedees (2016: 321-322).

Dalam budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki paling utama dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik. Hal ini merupakan permasalahan yang perlu dibenahi. Dari

berbagai permasalahan yang diungkap di atas maka perlu dikaji agar dapat mengetahui penyebab-penyebab kurangnya partisipasi kaum perempuan di panggung politik dan sekaligus memberikan solusi mengenai ren-dahnya partisipasi politik perempuan dalam bidang politik.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Penulis mengkaji masalah yang diangkat dalam dengan berbagai literatur yang tersedia, baik itu buku jurnal yang relevan mengenai masalah yang diangkat, yakni perempuan dalam budaya patriarki.

Perempuan dalam Budaya Patriarki

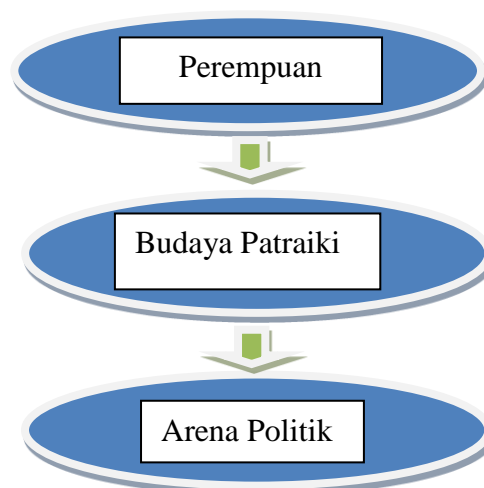
Budaya patriarki masih melekat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi paling atas, sebagaimana pendapat dari Nurmila (2015: 2) yang menyatakan bahwa semua masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem patriarki, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakatnya. Yusalia (2014:198) menyatakan bahwa budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah superior. Dengan maksud bahwa laki-laki berada pada posisi wanita sehingga bisa mengendalikan wanita, budaya seperti ini tumbuh pada masyarakat zaman dulu dan menciptakan mitos-mitos tertentu. Budaya patriarki juga muncul dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Nurcahyo (2016:27) menyatakan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dijadikan alasan mengapa masyarakat menempatkan mereka pada posisi lemah.

Dari uraian di atas maka budaya patriarki juga mempunyai tantangan, sehingga menurut Yusilia (2014:201) menyatakan bahwa tantangan budaya patriarki memberikan masalah tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan pluralisme yang berlangsung, pada realitasnya tampak dari bagaimaa satu kelompok sulit untuk menerima kelompok lain pada posisi tertentu.

Dari berbagai bidang keilmuan telah membahas budaya patriarki berdasarkan bidang masing-masing dan pada bidang ilmu kedokteran juga membahas mengenai patriarki, sehingga Saadawi (2011:158) menyatakan bahwa ilmu kedokteran patriarki penuh dengan kebenaran dan konsep-konsep tidak ilmiah yang dengan tujuannya ialah untuk mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan.

Berbagai pembahasan mengenai budaya patriarki, yang lebih mempoisisikan kaum laki-laki sebagai yang paling utama jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Dari hal inilah yang membuat perempuan merasa kurang didukung dan didiskriminasi dalam bidang politik. Untuk lebih jelasnya penulis merumuskan pada bagan berikut ini:

Bagan 1 Perempuan dalam budaya patriarki dalam bidang politik



Berdasarkan bagan 1 penulis menganalisis bahwa salah satu faktor yang membuat perempuan kurang percaya diri untuk maju ke arena politik ialah budaya patriarki. Perempuan ingin melangkah ke arena politik tetapi masih kurang percaya diri. Budaya patriarki masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya patriarki, posisi kaum laki-laki paling utama daripada perempuan dan menganggap bahwa perempuan mengurus rumah tangga dan keluarga.

Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Yang penting, partisipasi politik merupakan proses aktif: seseorang mungkin menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan, namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Tindakan keterlibatan aktif termasuk partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara, menduduki jabatan tertentu, berkampanye untuk sebuah partai politik atau berkontribusi dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat, maupun tindakan inkonvensional, yang bisa dianggap absah, seperti menandatangani petisi atau mengikuti demonstrasi damai, atau yang ilegal, seperti protes dengan kekerasan atau menolak membayar pajak (Faulks 2010: 226-227).

Partisipasi politik perempuan, saat ini sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik (Susanti, 2015:3). Partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan 'merebut kursi' dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarkan kepentingan dan hak-hak perempuan (Dedees, 2016:321-322).

Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*) (Nurcahyo, 2016:25). Upaya memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi bagi perempuan yang lebih besar pada struktur setiap partai politik (Susanti, 2015: 4).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muarifah (2014: 372-372) menyatakan bahwa jumlah pemilihan perempuan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki dan begitu pula jumlah guru perempuan juga lebih banyak dari laki-laki. Ini berarti perempuan terutama guru perempuan lebih banyak menentukan gambaran peta kekuatan sosial politik dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Adapun susunan secara hirarki mengenai keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Milbraith (1969) dalam Ibiyinka (2014: 305-306) menyatakan bahwa ada beberapa poin yang menunjukkan tentang hierarki keterlibatan perempuan dalam politik, yakni:

- a. Memegang partai dan kantor publik
- b. Menjadi kandidat dalam suatu jabatan
- c. Meminta dana politik
- d. Menghadiri pertemuan dalam membahas strategi politik
- e. Menjadi anggota aktif sebuah partai
- f. Berkontribusi pada kampanye politik
- g. Menghadiri pertemuan atau demonstrasi politik
- h. Kontribusi moneter kepada suatu partai atau kandidat
- i. Menghubungi pejabat publik atau partai
- j. Memakai tombol pesta atau stiker

- k. Mencoba meyakinkan orang lain untuk memilih dengan cara tertentu

- l. Memilih

- m. Terbuka terhadap rangsangan politik.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik harus didukung agar mampu mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan dalam bidang politik, dengan tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

Hambatan Politik Perempuan

Berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan mengenai hambatan politik perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Sossou (2011) menyatakan bahwa kurangnya dukungan politik untuk kandidat dari perempuan. Hal ini menegaskan bahwa norma budaya dan sikap pada perempuan yang berkontribusi terhadap kekurangan program pelatihan berorientasi pada kepemimpinan dan pendidikan politik.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Sossou di atas, ada penelitian yang dilakukan oleh Nurwani (2017) yang menyatakan bahwa hasil temuan mengenai hambatan eksternal bagi perempuan ialah hambatan dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik. Hambatan eksternal dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Pemarginalan perempuan dari ranah publik
- b. Kompetensi
- c. Sistem perekrutan
- d. Aturan partai
- e. Hambatan birokrasi
- f. Hambatan ekonomi
- g. Hambatan pendidikan
- h. Hambatan *agency*

Terlepas dari hambatan eksternal di atas maka ada juga hambatan dari internal, yakni hambatan yang datang dari faktor diri perempuan Minangkabau yang menyangkut keputusan pribadi untuk aktif dalam politik. Dari hasil temuan mengenai hambatan internal, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Minat politik perempuan.
- b. Kemampuan politik perempuan
- c. Kesadaran politik perempuan

Adapun faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di bidang politik. Azis (2012:129) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di parlemen, kurang lebih ada tiga faktor yang memberikan pengaruh secara

signifikan dalam menentukan representasi perempuan pada institusi legislatif, yaitu:

- a. Pemahaman/penerimaan kultur (budaya).
- b. Peran partai politik
- c. Sistem pemilu

Dari beberapa penelitian mengenai hambatan politik perempuan di atas bahwa kurangnya dukungan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik, sehingga membuat perempuan kurang percaya diri dalam politik. Hal ini dibuktikan dengan faktor eksternal dan internal mengenai hambatan kaum perempuan untuk maju ke panggung politik.

Simpulan

Perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik, disebabkan karena adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya patriarki lebih mengutamakan kaum laki-laki jika dibandingkan dengan kaum perempuan. Kaum perempuan merasa didiskriminasi dan kurang dipercayai untuk maju ke panggung politik, hal inilah yang menyebabkan partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Sebagian besar posisi strategis dalam dunia politik selalu diduduki oleh kaum laki-laki.

Berbagai penelitian yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik oleh karena adanya dukungan bagi kaum perempuan. Selain itu, berbagai hambatan yang mengenai partisipasi perempuan dalam politik, baik hambatan dari eksternal maupun internal. Ada juga representasi perempuan di bidang politik, dalam hal ini di institusi legislatif, yakni dari sosial budaya dan lain sebagainya.

Diharapkan agar kaum perempuan dirangkul sehingga mereka bisa percaya diri dalam mengakses ke ranah politik. Perempuan memiliki perasaan yang halus, sifat yang lembut jadi harus menopang kaum perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis di bidang politik, agar kaum perempuan mampu mengimplementasikan karakter dasarnya yang halus itu melalui kepemimpinannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Azis. A. (2012). *Perempuan di persimpangan parlemen studi dalam perseptif politik hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dedeas Adek R. (2016). Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik. *Intizar*. Vol. 22 (2). Hlm: 321-322
- Faulks Keith (2010). *Sosiologi politik pengantar kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Ibiyinka Olusola Adesanya. (2014). Deborah: A paradigm for christian women's active participation in Nigerian Governance. *Feminist Theology*. Vol. 22. (3). Hlm: 305-306.
- Nimrah S. & Sakaria. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik (studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislative 2014). *The Politics*. Vol. 1. (2). Hlm: 173-182.
- Nurchahyo. A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*. Vol. 6 (1). Hlm : 25-27.
- Rohyati dkk. (2006). *Pilkada dan pengembangan demokrasi lokal*. Yogyakarta: KPU DIY.
- Saadawi N. E. (2011). *Perempuan dalam budaya patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sossou Marie Antoinette. (2011). We do not enjoy equal political rights: Ghanaian Women's perceptions on political participation in Ghana. *Sage Open*. Vol. 1. (9). Hlm: 7
- Susantti. (2015). Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Riau tahun 2013 (Studi kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *Jom FISIP*. Vol. 2. (2). Hlm: 1-18
- Yusilia. H. (2014). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki. *Wardah*. Vol. 28. (15). Hlm: 195-201.